



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## HASIL COP30 BELÉM

**Teddy Prasetiawan**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[teddy@dpr.go.id](mailto:teddy@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Konferensi Perubahan Iklim PBB *Conference of the Parties* ke-30 (COP30) yang diselenggarakan di Belém, Brasil, pada 10–22 November 2025 telah ditutup, namun masih menyisakan sejumlah catatan. Harapan yang disematkan dalam pertemuan yang disebut-sebut sebagai *COP of the Truth*, dinilai belum mampu menjawab tantangan krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan melalui rencana dan aksi nyata. Kesepakatan utama COP30 yang dikenal sebagai *The Belém Package* atau *Global Mutirão* mencakup beberapa hal penting, yaitu *pertama*, lonjakan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat mencapai US\$120 miliar per tahun pada 2035; *kedua*, target keuangan global baru sebesar US\$1,3 triliun per tahun untuk aksi iklim secara total, namun sebagian besar bersumber dari sektor swasta, bukan hibah langsung dari negara industri maju; *ketiga*, lahirnya *Tropical Forests Forever Facility* (TFFF) senilai US\$125 miliar per tahun yang merupakan insentif ekonomi bagi pelestarian hutan tropis, meskipun mekanisme ini berada di luar kerangka konvensi maupun Perjanjian Paris.

Namun, peningkatan dukungan finansial tersebut dibayangi oleh kegagalan dalam menyepakati mandat yang mengikat negara-negara anggota, terkait penghapusan (*phase-out*) bahan bakar fosil akibat penolakan dari koalisi produsen minyak dan gas besar. Selain itu, target nol deforestasi pada tahun 2030 dinilai lebih lemah dari kesepakatan COP28 di Dubai karena tidak memiliki kekuatan pemaksa bagi emitor besar. COP30 dinilai tidak menghasilkan komitmen konkret untuk menutup kesenjangan yang masih besar dalam mencapai batas aman 1,5°C yang ditetapkan Perjanjian Paris. Meskipun secara formal tetap menjaga arsitektur Perjanjian Paris, COP30 tidak menaikkan secara drastis kewajiban pengurangan emisi sebelum tahun 2030 sehingga beberapa media nasional dan internasional menyebutnya hanya sebagai upaya minimal untuk sebuah aksi global.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menilai bahwa ada kemajuan yang dicapai. Namun, dia mengingatkan bahwa proses konsensus akan semakin sulit dilakukan, terlebih saat dunia sedang mengalami ketegangan geopolitik. Pencapaian terbaik dari COP30 adalah adanya mekanisme transisi yang berkeadilan (*just transition mechanism*) yang mendefinisikan secara komprehensif tentang hak asasi manusia, hak pekerja, hak Masyarakat Adat, serta referensi kuat tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan pengembangan pemuda.

Peran Indonesia dalam COP30 juga menjadi sorotan. Paviliun Indonesia bertema *High Integrity Carbon Market* menghasilkan transaksi potensial US\$7,7 miliar dari sektor *Forest and Other Land Use* (FOLU), dengan mewajibkan pemerintah menyiapkan Rp16 triliun untuk pemulihan hutan tropis. Skema ini dinilai lebih menguntungkan dibanding mekanisme pasar karbon yang rumit dan fluktuatif. Bagi Indonesia, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar dunia, TFFF menawarkan peluang aliran dana *sovereign* yang lebih stabil untuk mendukung target *FOLU Net Sink 2030*. Tidak lagi sekadar proyek percontohan, skema ini dianggap sebagai insentif ekonomi riil bagi pemerintah daerah di Kalimantan dan Papua untuk menjaga tutupan hutan mereka. Jika

di sektor kehutanan terdapat kemajuan, di sektor energi masih perlu mendapat perhatian. Ketiadaan target global sektor energi yang mengikat memberikan waktu bagi Indonesia untuk mengatur ritme pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tarif listrik rakyat.

Beberapa media nasional menyebut bahwa Indonesia dalam COP30 sebagai *muted spectator* yang lebih sibuk menjual 2,75 juta kredit karbon daripada mendorong ambisi iklim kolektif. Suara Indonesia tak terdengar dalam upaya kolektif mendorong penghentian penggunaan energi fosil dan forestasi, kalah bersaing dengan Kolombia yang pada COP kali ini lebih vokal meskipun diplomasi Indonesia telah berhasil mengamankan kepentingan sebagai negara pemilik hutan hujan tropis. Namun, tantangan sesungguhnya ada di dalam negeri, yaitu bagaimana mengonversi komitmen global tersebut menjadi regulasi yang konsisten, memastikan dana TFFP dikelola secara transparan dan akuntabel, serta menjamin transisi energi tidak memberikan dampak negatif bagi ekonomi rakyat. COP30 bukan merupakan tujuan akhir, melainkan penanda dimulainya tahapan baru dalam upaya global mempercepat penanganan krisis iklim.

## Atensi DPR

COP30 di Belém, Brasil, telah usai. Meskipun Indonesia meraih keuntungan dari diplomasi karbon pada COP30, namun posisi pasifnya dalam isu transisi energi menuai kritik. Kini, tantangan utama beralih ke dalam negeri untuk memastikan agar komitmen global sebagai hasil COP30 dapat diimplementasikan secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam membuat kebijakan dan mengimplementasikannya secara konsisten terhadap komitmen Indonesia pada COP30. Komisi XII DPR RI juga perlu memastikan agar paket pendanaan yang menjanjikan, baik pendanaan adaptasi, aksi iklim, atau ITTF, dapat diakses dengan mudah. Mengingat sumber pendanaan didominasi oleh peran sektor swasta dan bank pembangunan multilateral, bukan hibah murni.

## Sumber

kompas.com, 25 dan 26 November 2025;  
nytimes.com, 23 November 2025;  
reuters.com, 23 November 2025;  
tempo.co, 22 dan 24 November 2025; dan  
thejakartapost.com, 25 November 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*